



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 8179-8185

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam: Sebuah Analisis Sosiologi Pendidikan Islam di Indonesia

Zumrotul Amalia Abrori, Nena Noviani, Asep Mulyana, Taufik Hidayat

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

[zumrotulamaliaabrori@gmail.com](mailto:zumrotulamaliaabrori@gmail.com), [nenanoviani89@gmail.com](mailto:nenanoviani89@gmail.com), [asepmulyana@uinssc.ac.id](mailto:asepmulyana@uinssc.ac.id), [taufik.ibnusyakiriin@gmail.com](mailto:taufik.ibnusyakiriin@gmail.com)

### Abstrak

*Pendidikan Islam di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk kelembagaan, terutama pesantren, madrasah, dan sekolah Islam modern, yang masing-masing memiliki karakteristik, fungsi sosial, serta orientasi pendidikan yang berbeda. Keragaman bentuk kelembagaan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam pembentukan identitas keislaman, struktur sosial, serta mobilitas sosial umat Islam di Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, pendidikan Islam turut beradaptasi dengan tuntutan modernitas, globalisasi, dan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia melalui perspektif sosiologi pendidikan dengan menelaah peran pesantren, madrasah, dan sekolah Islam sebagai institusi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis kritis terhadap karya-karya ilmuwan Muslim Indonesia serta teori-teori sosiologi pendidikan, seperti fungsionalisme, teori konflik, dan interaksionisme simbolik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika sosial, relasi kekuasaan, serta proses pembentukan makna dalam lembaga pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan berbasis kultural yang berperan penting dalam transmisi nilai-nilai keislaman, pembentukan moral, dan pemberdayaan sosial masyarakat lapisan bawah. Madrasah berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional, sekaligus sebagai sarana pembentukan kelas menengah Muslim yang adaptif terhadap perubahan sosial. Sementara itu, sekolah Islam modern cenderung berperan sebagai agen reproduksi kelas menengah dan elite Muslim urban dalam konteks globalisasi dan neoliberalisme pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam merupakan arena sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan, produksi makna, serta proses stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia.*

*Kata kunci: Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan, Pesantren, Madrasah, Sekolah Islam*

### 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk struktur, nilai, dan arah perkembangan suatu masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai mekanisme sosialisasi, internalisasi nilai, serta reproduksi budaya dan struktur sosial [1,2]. Melalui pendidikan, masyarakat mentransmisikan norma kolektif, keyakinan, dan kerangka moral yang memungkinkan individu berfungsi dalam tatanan sosial yang telah mapan. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang lebih luas, termasuk relasi kekuasaan, keberlanjutan budaya, dan perubahan sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang ditandai oleh tingkat religiositas yang tinggi dan keragaman multikultural, pendidikan Islam menempati posisi yang sangat penting. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga sebagai wahana utama pembentukan identitas keislaman masyarakat. Peran pendidikan Islam di Indonesia melampaui aspek pengajaran akademik semata, mencakup pembinaan moral, sosialisasi keagamaan, serta pelestarian nilai-nilai Islam di tengah arus transformasi sosial yang cepat. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi medan kajian sosiologis yang signifikan, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan berinteraksi dengan struktur sosial dan praktik pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan karakteristik yang khas dan beragam, yang terwujud dalam berbagai bentuk kelembagaan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam modern. Pesantren diakui sebagai lembaga

pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang tumbuh secara organik dari tradisi keagamaan dan kultural masyarakat lokal. Ciri utama pesantren meliputi keberadaan kyai, santri, masjid, asrama, serta pengajaran kitab-kitab klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning [3]. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pesantren secara historis juga berperan sebagai pusat dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi sosial. Keterikatan pesantren dengan struktur sosial lokal menjadikannya aktor penting dalam pembentukan otoritas keagamaan, disiplin moral, dan solidaritas komunal.

Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan nasional, madrasah muncul sebagai bentuk pembaruan pendidikan Islam yang berupaya mengintegrasikan mata pelajaran agama dan umum dalam kurikulum yang lebih terstruktur. Madrasah merepresentasikan upaya modernisasi pendidikan Islam tanpa melepaskan landasan keagamaannya. Pengakuan yuridis madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perspektif sosiologi, madrasah memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong mobilitas sosial di kalangan masyarakat Muslim, khususnya dari kelompok sosial ekonomi bawah dan menengah. Melalui sertifikasi formal dan kesesuaian dengan standar nasional, madrasah berkontribusi pada penempatan pendidikan Islam dalam struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain pesantren dan madrasah, dua dekade terakhir ditandai oleh pesatnya pertumbuhan sekolah Islam modern, terutama di wilayah perkotaan. Lembaga ini hadir sebagai respons atas kebutuhan kelas menengah Muslim terhadap pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sains, teknologi, dan kompetensi global. Sekolah Islam modern menekankan penggunaan bahasa asing, literasi teknologi, serta standar internasional, sembari tetap menanamkan kerangka moral Islam [4]. Namun, perkembangan sekolah Islam modern juga mencerminkan proses komodifikasi dan komersialisasi pendidikan Islam, di mana lembaga pendidikan semakin bergerak mengikuti logika pasar. Fenomena ini menunjukkan keterkaitan erat antara pendidikan, kapitalisme, dan pembentukan kelas sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Keberadaan dan perkembangan pesantren, madrasah, dan sekolah Islam modern menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak berdiri dalam ruang hampa sosial. Sebaliknya, pendidikan Islam senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, lembaga-lembaga ini dapat dipahami sebagai arena reproduksi sosial, perubahan sosial, serta pembentukan stratifikasi berbasis pendidikan [5, 2]. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu religius, tetapi juga memengaruhi posisi sosial, orientasi hidup, dan cara pandang keberagamaan peserta didik, yang pada akhirnya berdampak pada distribusi modal sosial, legitimasi kultural, dan peluang ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun memiliki peran strategis, pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan serius, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi kualitas sumber daya manusia, relevansi kurikulum, manajemen kelembagaan, serta mutu lulusan. Banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi kesulitan dalam menjaga kedalaman religius sekaligus meningkatkan daya saing akademik di tengah lanskap pendidikan global yang semakin kompetitif. Sementara itu, tantangan eksternal muncul dari globalisasi, modernisasi, penetrasi nilai-nilai budaya sekuler, serta persaingan dengan lembaga pendidikan umum dan internasional. Kondisi ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap posisi dan fungsi pendidikan Islam dalam struktur sosial kontemporer.

Dalam situasi tersebut, kajian pendidikan Islam melalui pendekatan sosiologi pendidikan menjadi semakin penting. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pesantren, madrasah, dan sekolah Islam berfungsi sebagai institusi sosial, bagaimana mereka merespons perubahan masyarakat, serta bagaimana kontribusinya dalam membentuk karakter, identitas, dan mobilitas sosial umat Islam di Indonesia. Perspektif sosiologis memberikan kerangka analitis untuk memahami hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan dan masyarakat tempat lembaga tersebut beroperasi.

Secara teoretis, pendidikan dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki berbagai fungsi. Dalam perspektif fungsionalisme, pendidikan berperan menjaga stabilitas dan kohesi sosial melalui transmisi nilai dan norma bersama. Durkheim (2006) menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana utama masyarakat dalam membentuk individu sesuai dengan kebutuhan kolektif, sehingga memungkinkan terciptanya integrasi dan solidaritas sosial [1]. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam berfungsi sebagai agen pembentukan moral, disiplin religius, dan identitas kolektif umat.

Sebaliknya, teori konflik menawarkan pembacaan kritis terhadap pendidikan sebagai instrumen kekuasaan dan dominasi. Bourdieu (1990) menyatakan bahwa pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial melalui transmisi modal budaya yang menguntungkan kelas dominan [5]. Dalam konteks pendidikan Islam, dinamika ini tampak pada kesenjangan antara pesantren tradisional dan sekolah Islam elit di perkotaan. Sekolah Islam modern dengan biaya tinggi kerap menjadi simbol kapital ekonomi dan budaya kelas menengah Muslim, sementara pesantren tradisional tetap lekat dengan masyarakat marginal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pun tidak terlepas dari stratifikasi kelas dan ketimpangan sosial.

Sementara itu, interaksionisme simbolik menekankan pendidikan sebagai ruang interaksi sosial tempat makna dan identitas dibentuk secara terus-menerus. Peran simbol, interaksi, dan makna bersama dalam membentuk realitas sosial. Dalam lingkungan pendidikan Islam, relasi antara guru dan murid, kyai dan santri, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan berkontribusi pada konstruksi makna tentang otoritas, kesalehan, dan pengetahuan. Dalam pesantren, misalnya, otoritas kyai tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga simbolik dan spiritual, yang memperkuat pola ketaatan dan komitmen moral santri.

Dari perspektif sosiologis, pendidikan Islam tidak hanya merupakan upaya normatif untuk membentuk individu saleh, tetapi juga mekanisme sosial dalam pembentukan kesadaran kolektif dan orientasi sosial umat. Pendidikan Islam memiliki misi ganda, yakni pembentukan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dalam realitas masyarakat Muslim Indonesia, pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga di ruang sosial yang lebih luas seperti masjid, majelis taklim, dan jejaring komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Azra (2002) menempatkan pendidikan Islam dalam kerangka dialektika antara tradisi dan modernitas [6]. Di satu sisi, pendidikan Islam berfungsi menjaga tradisi keilmuan klasik, sementara di sisi lain dituntut untuk merespons tantangan modernisasi, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketegangan ini menjadi ciri utama dinamika pendidikan Islam kontemporer. Lebih jauh, dalam perspektif sosiologi kritis, pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh ideologi, kekuasaan politik, dan kebijakan negara. Regulasi kurikulum, standarisasi kelembagaan, dan intervensi negara turut membentuk wajah pendidikan Islam, menempatkannya dalam negosiasi yang terus-menerus antara otonomi keagamaan, kekuasaan negara, dan tuntutan pasar.

Oleh karena itu, memahami pendidikan Islam secara sosiologis berarti menelaah bagaimana ajaran Islam, kepentingan sosial, kekuasaan politik, dan tekanan ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk praktik pendidikan. Melalui pendekatan ini, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam dapat dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis, yang terus bernegosiasi dengan perubahan konteks sosial. Perspektif ini memberikan landasan kritis untuk menganalisis kontribusi pendidikan Islam dalam membangun kohesi sosial, pengembangan moral, dan transformasi sosial di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, fungsi sosial, serta dinamika kelembagaan pendidikan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan interpretatif dengan fokus pada analisis pendidikan Islam sebagai institusi sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori-teori utama dalam sosiologi pendidikan, yaitu fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik, yang masing-masing digunakan untuk membaca fungsi sosial pendidikan Islam, relasi kekuasaan yang bekerja di dalamnya, serta proses produksi makna dalam praktik dan struktur kelembagaan pendidikan Islam [1, 5]

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan. Data tersebut mencakup literatur primer berupa karya-karya ilmuwan Muslim Indonesia dan akademisi yang membahas pendidikan Islam, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam modern. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder berupa buku teks sosiologi pendidikan, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Literatur dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi teoritis, konteks keindonesiaan, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam dan sosiologi pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara membaca secara cermat, mencatat, serta mengklasifikasikan konsep, temuan, dan argumen yang terdapat dalam berbagai sumber literatur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan historis pendidikan Islam, dinamika wacana akademik, serta konstruksi sosial lembaga pendidikan Islam di Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti fungsi sosial pendidikan Islam, stratifikasi sosial, relasi kuasa, dan pembentukan identitas keislaman, serta melakukan interpretasi kritis dengan menggunakan perspektif teori sosiologi pendidikan untuk mengungkap makna sosial di balik praktik dan struktur kelembagaan pendidikan Islam. Analisis ini bersifat dialogis antara teks, konteks sosial, dan kerangka teori sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan reflektif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan, konsep, dan temuan yang berasal dari literatur yang berbeda. Selain itu, dilakukan pula cross-check teori dengan menggunakan lebih dari satu perspektif sosiologi pendidikan guna meminimalkan bias analisis dan memperkaya kedalaman serta ketajaman interpretasi terhadap fenomena pendidikan Islam yang dikaji.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Hasil

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan realitas sosial yang terdiferensiasi secara historis, struktural, dan sosiologis, yang terwujud dalam tiga bentuk utama, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Ketiganya tidak berkembang secara linier atau seragam, melainkan muncul dari konteks sosial yang berbeda dan merespons kebutuhan umat Islam Indonesia pada fase sejarah tertentu. Pesantren tercatat sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh sejak proses Islamisasi Nusantara melalui jalur dakwah kultural dan pendidikan berbasis komunitas. Zamakhsyari Dhofier (2015) menegaskan bahwa pesantren lahir dari inisiatif ulama lokal yang membangun pusat pengajian di sekitar masjid, kemudian berkembang menjadi sistem pendidikan berasrama dengan kepemimpinan kyai dan kurikulum berbasis kitab kuning [3]. Pesantren dengan demikian tidak lahir sebagai proyek negara, tetapi sebagai institusi sosial-keagamaan yang tumbuh secara organik dari masyarakat Muslim pedesaan. Azyumardi Azra (2002) menempatkan pesantren sebagai bagian dari jaringan transmisi ulama antara Nusantara dan Haramain yang berperan penting dalam pembentukan ortodoksi Islam Indonesia [6].

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa struktur internal pesantren bertumpu pada otoritas kyai sebagai figur sentral yang memegang kekuasaan keilmuan, spiritual, dan sosial. Relasi antara kyai dan santri dibangun melalui pola kepatuhan, adab keilmuan, dan legitimasi moral yang tidak bersifat legal-formal, tetapi sosial-kultural [3]. Pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga fungsi dakwah dan pemberdayaan sosial umat [7]. Dalam praktik sosialnya, pesantren terbukti berperan sebagai instrumen mobilitas sosial bagi masyarakat lapisan bawah, karena akses pendidikan tidak sepenuhnya ditentukan oleh modal ekonomi, melainkan oleh kemauan belajar dan pengabdian [8]. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai ruang produksi modal sosial dan modal religius yang memungkinkan santri mengalami mobilitas vertikal melalui jalur keilmuan dan kepemimpinan keagamaan [2].

Madrasah muncul sebagai bentuk diferensiasi kelembagaan pendidikan Islam yang lahir dari dialektika antara tradisi pesantren dan sistem pendidikan modern. Azyumardi Azra (2002) menjelaskan bahwa madrasah merupakan hasil dari gerakan pembaruan Islam awal abad ke-20 yang berupaya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem pendidikan yang lebih terstruktur [6]. Secara historis, madrasah berada di titik temu antara proyek modernisasi pendidikan Islam dan proyek nasionalisasi pendidikan negara. Struktur otoritas madrasah bersifat birokratis dan rasional-legal, dengan kepala madrasah, guru, pengawas, dan kementerian sebagai rantai otoritas formal. Mastuhu (1994) mencatat bahwa madrasah menandai pergeseran dari kepemimpinan karismatik menuju kepemimpinan administratif [7]. Secara sosial, madrasah berfungsi sebagai jembatan mobilitas sosial bagi kelas menengah Muslim transisional dan sebagai instrumen integrasi nasional umat Islam.

Sekolah Islam merupakan fenomena pendidikan Islam paling mutakhir yang berkembang pesat sejak dekade 1990-an seiring dengan kebangkitan kelas menengah Muslim perkotaan. Azra (2002) menyebut sekolah Islam sebagai bentuk Islamisasi pendidikan modern yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem sekolah formal berbasis kurikulum nasional dan internasional [6]. Sekolah Islam dicirikan oleh manajemen profesional, standar

akademik kompetitif, orientasi global, serta penggunaan bahasa asing dan sertifikasi internasional. Struktur otoritas sekolah Islam bersifat manajerial dan korporatif, dengan yayasan, direktur, dan kepala sekolah sebagai aktor utama pengambil kebijakan. Guru direkrut sebagai tenaga profesional melalui sistem kontrak kerja, bukan sebagai figur spiritual sebagaimana kyai di pesantren. Dalam praktiknya, sekolah Islam berperan sebagai jalur mobilitas sosial bagi kelas menengah Muslim menuju elite profesional dan global, namun akses terhadap lembaga ini sangat ditentukan oleh modal ekonomi keluarga.

### 3.2 Diskusi

Temuan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai institusi netral atau semata-mata religius, melainkan sebagai arena sosial tempat berlangsungnya proses reproduksi nilai, kekuasaan, dan struktur kelas. Dalam perspektif fungsionalisme, posisi pesantren sejalan dengan pandangan Durkheim (2006) yang menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mereproduksi solidaritas sosial dan nilai moral kolektif [1]. Pesantren sejak awal berperan sebagai alat reproduksi norma keislaman dan kohesi sosial umat. Namun, berbeda dengan sekolah modern yang lahir dari proyek negara, pesantren berkembang secara bottom-up dan memperoleh legitimasi sosial yang kuat [8]. Dalam konteks kolonial, Abdurrahman Wahid (1999) bahkan melihat pesantren sebagai arena resistensi kultural terhadap dominasi pendidikan kolonial [9].

Dari sudut pandang teori konflik, relasi antara kyai dan santri dalam pesantren dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi kuasa simbolik yang bekerja secara halus namun efektif. Bourdieu (1990) menjelaskan bahwa dominasi simbolik tidak dipertahankan melalui paksaan fisik, melainkan melalui internalisasi nilai, bahasa, dan praktik sosial yang diterima sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan tidak perlu dipertanyakan [5]. Dalam konteks pesantren, proses ini berlangsung melalui pembentukan habitus santri yang sejak awal dibiasakan untuk memandang kyai sebagai sumber otoritas keilmuan, spiritual, dan moral yang nyaris absolut [10]. Bahasa keagamaan, tradisi penghormatan, serta struktur pembelajaran yang bersifat hierarkis berfungsi sebagai instrumen simbolik yang melegitimasi posisi kyai dalam struktur sosial pesantren.

Otoritas kyai dipertahankan melalui berbagai ritual kepatuhan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kultural dan simbolik, seperti adab dalam belajar, tata cara berinteraksi, serta narasi tentang keberkahan ilmu. Sistem pengajaran satu arah, khususnya dalam metode bandongan dan sorogan, menempatkan santri sebagai penerima pengetahuan yang pasif, sementara kyai diposisikan sebagai pemilik dan penjaga kebenaran keilmuan. Dalam kerangka Bourdieu (1990), praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk transmisi modal kultural dan modal simbolik yang memperkuat dominasi kelompok otoritatif di dalam pesantren [5]. Pengetahuan keagamaan klasik tidak hanya diajarkan sebagai isi kurikulum, tetapi juga sebagai simbol legitimasi sosial yang membedakan kyai dari santri dan lulusan pesantren dari masyarakat awam.

Namun demikian, relasi kuasa tersebut tidak sepenuhnya bersifat represif. Dalam banyak kasus, struktur hierarkis pesantren justru menghasilkan disiplin moral, etos keilmuan, dan loyalitas sosial yang kuat di kalangan santri [11]. Habitus kepatuhan dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan berkontribusi pada pembentukan karakter religius dan komitmen etika yang tinggi [12]. Di sinilah muncul paradoks sosiologis pesantren: struktur yang sama yang memungkinkan reproduksi dominasi simbolik juga membuka ruang bagi transformasi sosial dan mobilitas kultural, terutama bagi santri dari latar belakang ekonomi lemah [13]. Melalui akumulasi modal religius dan pengakuan sosial, santri dapat naik posisi dalam hierarki sosial masyarakat Muslim.

Meski demikian, dari perspektif kritis, struktur kuasa yang terlalu tertutup berpotensi membatasi ruang refleksi dan kritik internal. Ketika otoritas kyai diposisikan sebagai kebenaran yang tidak dapat digugat, relasi pedagogis cenderung menghambat dialog egaliter dan pembaruan metodologis [14]. Dalam konteks ini, dominasi simbolik bekerja paling efektif justru ketika santri menerima struktur tersebut sebagai sesuatu yang alamiah dan ideal [15]. Ketegangan antara fungsi emansipatoris pesantren sebagai ruang pemberdayaan sosial dan produksi intelektual keislaman dan fungsi reproduktifnya sebagai mekanisme pelestarian hierarki dan otoritas tradisional menjadi ciri utama pesantren dalam perspektif sosiologi pendidikan [16]. Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa pesantren tetap bertahan sebagai institusi sosial yang berpengaruh, namun sekaligus terus berada dalam perdebatan antara tradisi, kekuasaan, dan transformasi sosial.

Madrasah, sebagai institusi hibrida, merepresentasikan proses rasionalisasi pendidikan Islam dalam kerangka negara modern. Dalam perspektif Durkheim, diferensiasi madrasah mencerminkan tuntutan masyarakat modern terhadap spesialisasi dan standarisasi lembaga pendidikan [1]. Namun teori konflik membaca madrasah secara

lebih kritis sebagai instrumen negara untuk mengintegrasikan dan sekaligus mengontrol Islam dalam batas ideologi nasional [17]. Abdurrahman Wahid menilai bahwa pengakuan negara terhadap madrasah seringkali bersifat ambigu: diakui secara legal, tetapi diposisikan secara subordinat dibanding sekolah umum unggulan. Kondisi ini menciptakan stratifikasi simbolik dalam sistem pendidikan nasional, di mana lulusan madrasah kerap dianggap berada di bawah lulusan sekolah umum elit.

Sekolah Islam modern memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dalam konteks globalisasi dan neoliberalisme pendidikan. Dalam perspektif sosiologi kritis, sekolah Islam dapat dibaca sebagai bagian dari industrialisasi pendidikan, di mana pendidikan diproduksi dan dipasarkan sebagai komoditas dengan branding religius [18]. Bourdieu (1990) membantu menjelaskan bagaimana sekolah Islam menjadi arena reproduksi modal kultural dan simbolik kelas menengah Muslim melalui bahasa asing, sertifikasi internasional, dan gaya hidup religius-modern [5]. Nurcholish Madjid (1997) melihat fenomena ini sebagai kebangkitan kesadaran keislaman kelas menengah, tetapi sekaligus mengingatkan risiko reduksi Islam menjadi identitas simbolik yang terlepas dari komitmen etika sosial [8]. Abdurrahman Wahid (1999) secara tegas mengkritik privatisasi pendidikan Islam yang berpotensi menghilangkan watak kerakyatan pendidikan Islam itu sendiri [9].

Secara keseluruhan, diferensiasi antara pesantren, madrasah, dan sekolah Islam tidak hanya menunjukkan variasi kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, tetapi juga merefleksikan stratifikasi sosial dan dinamika kelas dalam masyarakat Muslim yang semakin kompleks [19]. Pesantren, dengan karakter tradisional dan kulturalnya yang kuat, umumnya berakar pada komunitas pedesaan dan kelas sosial bawah, berfungsi sebagai ruang reproduksi nilai-nilai keagamaan, solidaritas komunal, serta otoritas keilmuan berbasis karisma kiai. Dalam konteks ini, pesantren sering berperan sebagai institusi resistensi kultural terhadap modernisasi yang hegemonik, sekaligus sebagai benteng moral bagi masyarakat marginal.

Sementara itu, madrasah hadir sebagai bentuk institusionalisasi dan birokratisasi pendidikan Islam, yang berupaya menjembatani tuntutan tradisi keislaman dengan kebutuhan negara modern. Madrasah menempati posisi transisional, terutama bagi kelas menengah Muslim yang menginginkan pendidikan agama formal namun tetap diakui secara administratif dan berorientasi pada mobilitas sosial. Dengan kurikulum yang distandardisasi dan keterikatan pada regulasi negara, madrasah menjadi arena negosiasi antara kepentingan religius, politik pendidikan nasional, dan rasionalitas teknokratis [20].

Di sisi lain, sekolah Islam khususnya yang berlabel “Islam terpadu”, “internasional”, atau “global” muncul sebagai simbol aspirasi kelas menengah urban dan elite Muslim. Institusi ini tidak hanya menawarkan integrasi antara sains modern dan nilai-nilai Islam, tetapi juga memproduksi identitas keislaman baru yang kosmopolitan, profesional, dan kompetitif secara global. Sekolah Islam dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana diferensiasi sosial, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas sekaligus menjadi penanda status ekonomi dan kultural [21].

Sebagaimana ditegaskan Tilaar (2012), pendidikan tidak pernah netral atau bebas nilai, melainkan selalu berada dalam relasi kepentingan sosial, ideologis, dan struktur kekuasaan tertentu [2]. Oleh karena itu, dinamika pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses hegemonisasi nilai, reproduksi kelas sosial, serta perebutan makna keislaman di ruang publik. Pendidikan Islam harus dipahami sebagai spektrum institusional yang dinamis, yang terus bergerak dalam tarik-menarik antara idealitas normatif ajaran Islam dan realitas struktural sosial-ekonomi yang terus berubah, baik di tingkat lokal maupun global..

#### **4. Kesimpulan**

Pendidikan Islam di Indonesia perlu dipahami sebagai realitas sosial yang plural dan terdiferensiasi, bukan sebagai satu sistem yang tunggal dan homogen. Pendidikan Islam hadir dalam tiga model kelembagaan utama, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, yang masing-masing dibentuk oleh kondisi sosial, historis, dan struktural yang berbeda. Ketiga institusi ini mencerminkan interaksi dinamis antara tradisi keislaman, modernisasi yang digerakkan oleh negara, serta transformasi sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara keseluruhan, pendidikan Islam menunjukkan proses negosiasi yang berkelanjutan antara idealitas keagamaan dan tuntutan sosial yang terus berubah, sehingga menghasilkan orientasi dan capaian pendidikan yang beragam. Pesantren merupakan bentuk pendidikan Islam tertua dan paling berakar secara kultural, yang tertanam kuat dalam tradisi keagamaan lokal dan kehidupan komunitas. Secara sosiologis, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi pengetahuan dan nilai-nilai moral Islam, tetapi juga sebagai ruang reproduksi otoritas simbolik, modal religius, dan hierarki sosial. Di satu sisi, pesantren memainkan peran emansipatoris dengan membuka akses

pendidikan bagi kelompok masyarakat marjinal, namun di sisi lain tetap beroperasi dalam struktur tradisional yang berpotensi mereproduksi stratifikasi sosial. Karakter ganda ini menempatkan pesantren dalam ketegangan yang terus-menerus antara transformasi sosial dan pelestarian otoritas keagamaan yang mapan. Madrasah merepresentasikan model hibrida yang lahir dari perjumpaan antara pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan nasional modern. Melalui integrasi mata pelajaran agama dan umum, madrasah berperan penting dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong mobilitas sosial, khususnya bagi komunitas Muslim kelas bawah dan menengah. Pada saat yang sama, madrasah juga berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional dan standarisasi ideologis, yang menyelaraskan pendidikan Islam dengan kebijakan dan kerangka kurikulum negara. Meskipun memiliki posisi strategis, madrasah masih menghadapi ketimpangan struktural dalam hierarki pendidikan nasional, terutama dalam hal sumber daya, pengakuan, dan otonomi kelembagaan. Sekolah Islam, sebagai perkembangan paling mutakhir dalam lanskap pendidikan Islam, mengalami ekspansi pesat seiring dengan tumbuhnya kelas menengah Muslim perkotaan dan tekanan globalisasi. Lembaga ini dicirikan oleh praktik manajemen modern, standar akademik yang kompetitif, serta orientasi yang kuat pada kompetensi global. Dalam perspektif sosiologis, sekolah Islam semakin berfungsi sebagai mekanisme reproduksi identitas kelas menengah dan elite, dengan menempatkan pendidikan keagamaan dalam logika pasar. Meskipun mengusung ideal integrasi iman, ilmu, dan amal, sekolah Islam juga menghadapi risiko penguatan eksklusivisme sosial dan komodifikasi nilai-nilai keislaman. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai institusi yang netral atau semata-mata bersifat keagamaan, melainkan sebagai arena sosial yang kompleks tempat relasi kuasa, dinamika kelas, dan pembentukan identitas dinegosiasikan secara aktif. Diferensiasi antara pesantren, madrasah, dan sekolah Islam mencerminkan fragmentasi sosial yang lebih luas dalam masyarakat Muslim Indonesia, yang dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, intervensi negara, dan arus budaya global. Dengan demikian, pendekatan sosiologi pendidikan memberikan perspektif yang lebih kritis dan bernuansa dalam memahami peran pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran keagamaan, mobilitas sosial, dan arah masa depan masyarakat Muslim di Indonesia.

## Referensi

1. E. Durkheim, *Pendidikan dan Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
2. H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
3. Z. Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES, 2011.
4. A. Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
5. P. Bourdieu and J. C. Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications, 1990.
6. A. Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002.
7. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
8. N. Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
9. A. Wahid, *Pesantren sebagai Subkultur*. Jakarta: LP3ES, 1999.
10. I. Abdullah, *Rekonstruksi dan Reproduksi Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
11. P. Bourdieu, "The forms of capital," in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, J. Richardson, Ed. New York, NY: Greenwood Press, 1986, pp. 241–258.
12. S. Bowles and H. Gintis, *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. New York, NY: Basic Books, 1976.
13. A. M. Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1999.
14. P. Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, 2008.
15. C. Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
16. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
17. D. Rahardjo, *Intelektual, Intellegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan, 1999.
18. M. Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
19. Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
20. Zamakhsyari, M., *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI, 2001.
21. Zubaedi, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.